

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, dengan berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak. Meskipun terjadi peningkatan dalam aksesibilitas pendidikan dasar, masih terdapat ketidakmerataan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) telah mengembangkan Sustainable Development Goals (SDG), di mana SDG 4 merupakan penjelasan pentingnya pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk semua. SDG 4 menargetkan akses pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas, serta memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan untuk belajar.

Di Indonesia, upaya untuk mencapai SDG 4 mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, dan kebijakan yang mendukung pendidikan kepada anak yang berkebutuhan. Kerjasama antara Indonesia dan Australia telah mengalami perkembangan yang dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pemerintah telah menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama melalui berbagai program untuk mencapai tujuan ini.

Program *The Innovation for Indonesia's School Children* atau INOVASI telah berkembang menjadi inisiatif antara pemerintah Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia

melalui pendekatan-pendekatan inovatif dan berbasis bukti. Dalam kerangka program ini, Australia tidak hanya memberikan dukungan teknis yang komprehensif tetapi juga memberikan berbagai sumber daya yang diperlukan, mulai dari pelatihan guru, pengembangan kurikulum, hingga penyediaan teknologi pendidikan. Upaya ini melibatkan kerjasama erat antara berbagai pemangku kepentingan di kedua negara untuk merancang dan menerapkan solusi-solusi yang efektif dalam upaya meningkatkan hasil pendidikan anak-anak di Indonesia.

Kerjasama di bidang pendidikan ini mencakup berbagai program dan inisiatif inovatif yang dirancang untuk merangsang perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pengembangan metode pengajaran yang lebih efisien, penguatan kapasitas institusi pendidikan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Program ini juga berkomitmen untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi-strategi yang diterapkan secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa inisiatif yang diambil memberikan dampak dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi mendatang.

Australia dikenal luas dengan sistem pendidikan berkualitas tinggi, yang secara konsisten mengutamakan pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pemikiran kritis di kalangan siswa. Sistem pendidikan di negara ini menerapkan pendekatan berbasis inklusi yang mendalam dan menyeluruh, di mana perhatian khusus diberikan pada kebutuhan individu setiap siswa. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang

sosial, ekonomi, atau budaya mereka, mendapatkan akses ke pendidikan yang sesuai dan layak sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan demikian, sistem pendidikan Australia tidak hanya memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan penuh dari potensi mereka. Hal ini sangat penting dalam memungkinkan anak-anak dari berbagai latar belakang yang beragam untuk mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi dan mencapai pencapaian yang paling baik.

Melalui program ini Australia tidak hanya menyediakan bantuan finansial, tetapi memberikan pengetahuan dalam pengembangan sistem seperti pelatihan intensif untuk guru agar tenaga pendidik di Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Australia, sementara para ahli pendidikan dari Australia dapat memahami konteks pembelajaran di Indonesia agar dapat merancang program yang lebih efektif dan memperkenalkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Program INOVASI melakukan kegiatan uji coba dan telah mencari tahu apa yang berhasil dan tidak berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pendidikan karakter, inklusi, numerasi, dan literasi.

Australia menerapkan pendekatan *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA) dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan program INOVASI yang bekerja sama dan belajar langsung dengan mitra setempat. Australia telah mengidentifikasi masalah yang ada dan merancang solusi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak di Indonesia.

Problem Driven Iterative Adaptation adalah pendekatan dalam manajemen dan penyelesaian masalah yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan dinamis dengan cara yang adaptif dan berorientasi pada masalah yang ada. PDIA berfokus pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang ada, kemudian mengembangkan solusi secara bertahap melalui proses iteratif yang melibatkan eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan. PDIA menggabungkan analisis masalah yang cermat dengan proses adaptasi yang fleksibel, memungkinkan tim untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan umpan balik dan temuan baru. Dengan demikian, PDIA membantu program INOVASI untuk menciptakan dan menerapkan solusi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan pendidikan yang kompleks di Indonesia.

Program INOVASI telah melaksanakan pendekatan ini di empat provinsi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Dalam rangka implementasi pendekatan ini, program INOVASI bekerja sama dengan berbagai pihak di provinsi tersebut untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Melalui kerjasama dan adaptasi yang terus-menerus, diharapkan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya dapat lebih tepat sasaran tetapi juga lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pembelajaran di setiap provinsi, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut.

Di Jawa Timur, program INOVASI memusatkan perhatian pada beberapa aspek dari sistem pendidikan yang memerlukan perbaikan. Program ini dimulai dengan proses mendalam untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di provinsi tersebut, kemudian mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan masyarakat setempat untuk merancang solusi yang tidak hanya relevan tetapi juga efektif dan praktis untuk pendidikan anak di Jawa Timur. Proses ini melibatkan perancangan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di tiap daerah, diikuti dengan implementasi solusi yang dirancang dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar memenuhi tujuan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Jawa Timur.

Oleh karena itu, penelitian tentang dampak kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam program INOVASI terhadap pendidikan di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas program INOVASI dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi juga akan memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi selama implementasi program tersebut. Selain itu, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan memajukan sistem pendidikan di Indonesia.

Penulis kemudian memilih untuk melakukan penelitian atas beberapa alasan, yaitu program INOVASI menawarkan konteks yang kaya dan relevan untuk diteliti. Dengan fokus pada pengembangan pendidikan di Indonesia, program ini menarik untuk saya teliti karena saya dapat membahas kerjasama bilateral dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, judul skripsi tentang Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program INOVASI dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia menawarkan kesempatan yang menarik dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelidiki isu-isu penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia dan hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang pendidikan, khususnya melalui program INOVASI dibatasi pada kurun waktu 2016-2022. Karena dalam kurun waktu tersebut telah berlangsung kerja sama atau program INOVASI yang memiliki potensi untuk menghasilkan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kerjasama tersebut terhadap aspek pendidikan di Indonesia. Berdasarkan batasan diatas, penulis mengajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia-Australia melalui program INOVASI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia?

2. Bagaimana dampak yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia setelah implementasi program INOVASI di Kota Batu?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dampak kerja sama Indonesia-Australia melalui program INOVASI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi dalam sistem pendidikan di Kota Batu setelah implementasi program INOVASI.

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis:

1. Memberi pemahaman akademis mengenai alasan di balik bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia dalam sektor pendidikan, serta untuk mengevaluasi signifikansi dan dampak positif dari program bantuan tersebut.
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti berikutnya yang ingin membahas khususnya dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia.

D. Kerangka Konseptual

1. Teori Kerjasama Bilateral di Bidang Pendidikan

Hubungan bilateral adalah kondisi yang mencerminkan adanya interaksi saling mempengaruhi antara dua pihak. Pentingnya

hubungan bilateral bagi sebuah negara adalah sebagai interaksi antara dua negara yang saling menghormati kedaulatan masing-masing dan berupaya untuk memajukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keohane (2012) menjelaskan bahwa interdependensi antara negara-negara membuat kerjasama bilateral menjadi sangat efektif dalam mengatasi masalah bersama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian serta menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat dari hubungan bilateral ini. Sebagian besar kerjasama internasional dilakukan secara bilateral karena memungkinkan negara-negara untuk lebih fokus pada kepentingan bersama mereka tanpa terlalu banyak pihak yang terlibat.

Kerjasama lintas negara di dunia dibangun atas dasar saling menghormati dan menguntungkan satu sama lain. Hal ini juga terlihat dalam kemitraan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sektor-sektor khusus. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dimulai pada tahun 1949, ketika Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun sebelumnya. Peneliti seperti Dr. Andrew Rosser telah membahas dinamika hubungan kedua negara ini, menyoroti peran Australia dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana hal ini membentuk fondasi hubungan diplomatik yang lebih luas.

Kerjasama bilateral dasarnya didorong oleh kepentingan bersama yang saling menguntungkan kedua negara. Menurut Keohane dan Nye (1977), kerjasama bilateral yang efektif didasarkan pada prinsip interdependensi kompleks, di mana kedua negara saling mempengaruhi melalui berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks pendidikan, kerjasama bilateral menciptakan peluang bagi transfer pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas antara negara-negara mitra. Kerjasama ini juga membuka ruang untuk diplomasi pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di negara penerima, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan strategis kedua negara. Dalam kasus Indonesia dan Australia, kerjasama melalui program INOVASI menunjukkan bagaimana kedua negara dapat menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, khususnya dalam sektor pendidikan. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia tetapi juga mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara yang telah terjalin sejak lama.

Brubacher (1955), menjelaskan dialog antara berbagai pemikiran pendidikan, yang mencerminkan kebutuhan untuk membangun kerjasama dan komunikasi antar negara atau institusi. Melalui pertukaran ide dan pengalaman, institusi pendidikan dapat

mengadopsi metode yang lebih efektif sesuai tingkat daerah. Kerjasama ini juga membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pendidikan, menghasilkan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan menerapkan teori kerjasama bilateral dapat membantu dalam menganalisis struktur, proses, dan hasil kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam program INOVASI. Teori ini dapat digunakan untuk melihat kerjasama Indonesia-Australia dalam pengelolaan pendidikan dengan praktik-praktik internasional dalam diplomasi pendidikan dan kerjasama antarnegara.

2. Teori *Foreign Aid*

Bantuan luar negeri merupakan strategi integral dalam kebijakan luar negeri yang direncanakan secara sistematis untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Bentuk bantuan ini dapat mencakup berbagai jenis dukungan, seperti untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim, yang secara keseluruhan berfungsi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat internasional. Amartya Sen (1999) dalam bukunya '*Development as Freedom*' menyatakan bahwa pengembangan sejati tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan penghapusan kemiskinan, peningkatan kebebasan, dan perlindungan hak individu. Selain itu, bantuan ini sering kali juga

dimaksudkan bantuan finansial yang meliputi dana atau pinjaman, serta bantuan teknis yang berupa transfer pengetahuan, pelatihan, dan bantuan teknologi.

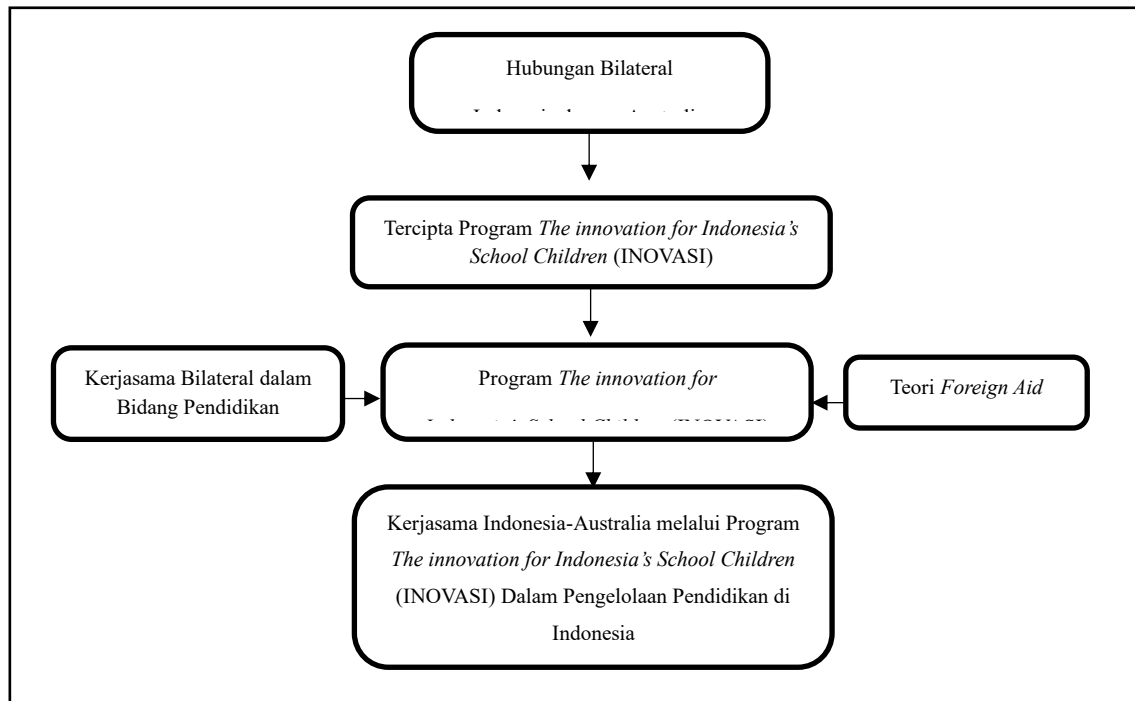
Beberapa ahli telah menginterpretasikan bantuan luar negeri secara beragam. K.J. Holsti (1995), dalam bukunya '*International Politics: Framework of Analysis*', menjelaskan bahwa bantuan luar negeri adalah proses di mana suatu negara mengalihkan dana, teknologi, atau nasihat teknis kepada negara penerima. Kemudian, dalam jurnal Hans Morgenthau yang berjudul '*A Political Theory of Foreign Aid*', mengklasifikasikan bantuan luar negeri ke dalam enam kategori antara lain; *humanitarian foreign aid*, *subsistence foreign aid*, *military foreign aid*, *bribery*, *prestige foreign aid*, dan *foreign aid for economic development*.

Pemerintah negara-negara maju sering kali menjadi penyumbang utama bantuan luar negeri, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun melalui lembaga-lembaga Internasional. Australia salah satu negara yang memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia, yang merupakan negara tetangga terdekat sekaligus mitra kerjasama memberikan bantuan meliputi berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, keamanan, penanggulangan bencana, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur, dan pendidikan.

Teori bantuan luar negeri dalam bidang pendidikan mempunyai fokus untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di negara-negara berkembang melalui dukungan dari negara atau organisasi internasional. Melalui bantuan luar negeri, seperti dana, program pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas pengajaran, dan kesenjangan akses pendidikan. Selain itu, teori ini melakukan penyesuaian program bantuan agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat, sehingga dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, teori Foreign Aid relevan untuk memahami bagaimana bantuan luar negeri dari Australia kepada Indonesia, melalui program INOVASI. Dengan menggunakan teori ini penulis dapat menganalisis peran serta partisipasi baik dari pihak pemberi bantuan (Australia) maupun pihak penerima (Indonesia) dalam implementasi meningkatkan kualitas pendidikan anak di Indonesia.

3. Kerangka Skema Penelitian (Bagan Konseptual)



Sumber: Ditulis Oleh Penulis

Bagan diatas menjelaskan bagaimana penelitian ini mengkaji hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, yang merupakan dasar dari pembentukan program *The Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI). Hubungan bilateral ini membuka peluang bagi kedua negara untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam pelaksanaan program INOVASI, penelitian ini menerapkan **teori kerjasama bilateral** dan **teori *foreign aid***. Teori kerjasama bilateral menjelaskan bagaimana dua negara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, sementara teori *foreign aid* menekankan peran bantuan luar negeri dalam mendukung pembangunan dan reformasi di negara penerima bantuan. Melalui

penerapan kedua teori tersebut, peneliti mengevaluasi bagaimana kerjasama antara Indonesia - Australia terwujud dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bagaimana kerjasama bilateral ini memperkuat hubungan antara kedua negara mencapai hasil yang bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang melibatkan observasi untuk memahami implementasi program INOVASI serta dampaknya di Kota Batu. Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil program. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas program dalam pengelolaan pendidikan serta pengaruh kerjasama internasional terhadap praktik pendidikan di tingkat provinsi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen untuk menggali data terkait implementasi dan dampak program INOVASI. Data utama diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak terkait, seperti laporan tahunan program INOVASI, serta laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selain itu, studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis.

Teknik ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas program INOVASI tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Dengan pendekatan ini, penulis berfokus pada analisis konten yang mendalam terhadap data sekunder untuk mengidentifikasi pola, tema, serta dampak program dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggabungkan data yang ada lalu memilah data agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis tentukan. Teknik ini membantu mengelompokkan informasi berdasarkan pola dan kategori yang relevan dengan implementasi program INOVASI dan dampaknya.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deduktif yang sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan. Metode ini melibatkan pengumpulan data umum terlebih dahulu, sebelum menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program dan dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia.

F. Rancangan Komposisi Bab

Berikut merupakan alur sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan kedalam lima bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka yang berisi telaah pustaka terkait penelitian terdahulu yang bisa membantu penelitian sekaligus memberi gambaran pembeda penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pada bab ini juga akan dipaparkan tinjauan pustaka terkait dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama konsep kerjasama bilateral yang menjelaskan adanya perilaku dua negara yang melakukan kerjasama demi mencapai kepentingan setiap negara. Kemudian konsep kedua yang akan digunakan dan dijelaskan pada bab ini adalah konsep teori *foreign aid*. Dimana pada bab ini akan dijelaskan terkait definisi dan penjelasan lebih dalam mengenai teori bantuan luar negeri.

BAB 3 Gambaran Umum berisi penjelasan secara umum terkait data dari variabel penelitian yang akan dianalisis. Pada bagian pertama akan dijelaskan sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kualitas pendidikan anak di Indonesia, dan pengantar dari program INOVASI, kemudian program INOVASI di Kota

Batu. Dalam penjelasan ini akan dijelaskan berbagai hal terkait kontribusi program INOVASI dalam pengelolaan pendidikan anak di Indonesia.

BAB 4 Pembahasan yang akan memberi penjelasan terkait hasil penelitian dan analisis yang bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisis yang dilakukan adalah menganalisis dampak dan hasil dari kerjasama Indonesia-Australia melalui Program INOVASI.

BAB 5 Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas kajian literatur mengenai dua konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, yaitu Teori kerjasama Bilateral di Bidang Pendidikan dan Teori *Foreign Aid*. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap literatur dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan variabel-variabel dalam studi ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian.

A. Teori Kerjasama Bilateral di Bidang Pendidikan

Kerjasama bilateral, khususnya dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan internasional yang dapat memperkuat ikatan antara negara-negara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pendidikan, kerjasama bilateral dapat mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari program pertukaran pelajar dan dosen, pembangunan infrastruktur pendidikan, hingga bantuan teknis dan pengembangan kurikulum. Penelitian mengenai kerjasama bilateral di bidang pendidikan telah mengungkapkan betapa besar potensi manfaatnya bagi negara-negara berkembang, namun juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai hasil yang paling baik.

Teori tentang kerjasama bilateral dalam pendidikan seringkali melibatkan pendekatan yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, pembangunan kapasitas, dan penguatan sistem pendidikan di negara penerima

bantuan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah perspektif pembangunan manusia (*human development perspective*), yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, program kerjasama pendidikan bilateral antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang sering kali dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang terlayani, dengan harapan dapat menciptakan efek berkelanjutan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai kerjasama bilateral di bidang pendidikan juga menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama ini sangat bergantung pada kemampuan negara penerima untuk menyusun kebijakan pendidikan yang tepat dan berkelanjutan. Sebuah studi oleh Johnson dan Lee (2014) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan pendidikan yang jelas dan stabil cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan bantuan pendidikan yang diterima. Dalam hal ini, bantuan pendidikan bilateral dapat menjadi lebih efektif jika disalurkan kepada negara yang memiliki visi dan komitmen kuat terhadap reformasi pendidikan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, negara-negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif dan berbasis hasil, seperti peningkatan kualitas guru dan perbaikan infrastruktur sekolah, dapat memanfaatkan bantuan pendidikan dengan lebih maksimal.

Namun, keberhasilan kerjasama bilateral di bidang pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pendidikan yang baik dan terencana, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang lebih kompleks dan bersifat struktural, seperti stabilitas politik, kualitas pemerintahan, dan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana bantuan. Faktor-faktor ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan oleh negara donor dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Yip (2017) menyoroti bahwa stabilitas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program pendidikan internasional. Tanpa adanya struktur pemerintahan yang kuat dan sistem yang transparan, kerjasama pendidikan bilateral sering kali menghadapi tantangan serius, yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan manajemen publik yang lemah seringkali mengalami kesulitan dalam merancang, melaksanakan, dan memonitor proyek-proyek pendidikan yang didanai oleh kerjasama internasional. Dalam kondisi tersebut, dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara baik, yang tentunya mengurangi dampak positif dari bantuan tersebut.

Penting bagi negara donor untuk memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas serta transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dan alokasi dana pendidikan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pelaporan

yang terbuka, dana pendidikan yang diberikan dapat digunakan dengan cara yang lebih efisien dan tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberi manfaat bagi perkembangan sistem pendidikan di negara penerima. Dengan demikian, keberhasilan dalam kerjasama bilateral di bidang pendidikan bukan hanya bergantung pada komitmen politik kedua belah pihak, tetapi juga pada tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan kemauan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem administrasi publik.

Selain itu, kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan juga menghadapi tantangan terkait dengan kesenjangan antara kebutuhan daerah dan pendekatan yang diterapkan oleh negara donor. Beberapa peneliti, seperti De Grauwe (2009), berpendapat bahwa banyak program pendidikan yang dirancang oleh negara donor tidak selalu sesuai dengan wilayah dan kebutuhan spesifik negara penerima. Sebagai contoh, meskipun negara donor seringkali menawarkan program yang sukses di negara mereka sendiri, namun program tersebut mungkin tidak sepenuhnya relevan atau efektif di negara dengan tantangan pendidikan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, penting bagi program kerjasama bilateral untuk lebih berfokus pada pendekatan yang berbasis pada kebutuhan daerah, dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat di negara penerima dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Di sisi lain, kerjasama pendidikan bilateral juga menawarkan peluang untuk memperkuat hubungan antar negara dan membangun jaringan internasional yang saling menguntungkan. Penelitian oleh Smith dan Williams (2015) menunjukkan bahwa pertukaran pelajar dan dosen, serta kerjasama riset

antar universitas, dapat memperkaya pengalaman akademik dan menciptakan peluang untuk inovasi. Program seperti Erasmus di Uni Eropa, atau beasiswa dari pemerintah negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah membantu banyak mahasiswa dari negara berkembang untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kerjasama bilateral dalam pendidikan dapat dilihat sebagai alat diplomasi yang efektif, yang tidak hanya mendukung pembangunan pendidikan tetapi juga memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara negara-negara yang terlibat.

Namun, seperti halnya bentuk kerjasama internasional lainnya, kerjasama bilateral dalam pendidikan juga tidak terlepas dari kritik. Beberapa peneliti, seperti Moyo (2009), mengingatkan bahwa ketergantungan pada bantuan luar negeri, termasuk dalam sektor pendidikan, dapat menciptakan siklus ketergantungan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, negara penerima mungkin menjadi terlalu bergantung pada bantuan pendidikan, yang dapat menghambat perkembangan kapasitas internal mereka untuk membangun sistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan. Maka dari itu, banyak ahli berpendapat bahwa tujuan utama dari kerjasama bilateral pendidikan haruslah untuk memberdayakan negara penerima, sehingga mereka dapat mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan mereka secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan luar negeri.

Kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan bisa disimpulkan sangat penting dalam mendukung pembangunan manusia dan peningkatan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa

meskipun kerjasama ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan, keberhasilan jangka panjangnya sangat tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan pendidikan yang mendukung, manajemen yang baik, dan keberlanjutan program. Untuk memastikan bahwa kerjasama pendidikan bilateral dapat mencapai hasil yang maksimal, penting bagi negara donor dan negara penerima untuk bekerja sama secara erat, dengan memperhatikan masyarakat dan kebutuhan spesifik negara penerima. Dengan pendekatan yang tepat, kerjasama pendidikan bilateral tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antar negara dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Teori Foreign Aid

Teori foreign aid atau bantuan luar negeri merupakan area kajian yang luas dan multidimensional dalam hubungan internasional dan ekonomi pembangunan. Bantuan luar negeri dirancang untuk memberikan dukungan finansial, teknis, dan sumber daya lainnya kepada negara-negara berkembang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu dalam pemecahan masalah sosial yang kompleks. Berbagai pendekatan teoritis telah dikembangkan untuk memahami dinamika bantuan luar negeri, dan masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap efektivitas dan tujuan dari bantuan itu sendiri.

Salah satu pendekatan penting dalam teori foreign aid adalah pendekatan yang mengedepankan pentingnya bantuan sebagai alat untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurut Burnside dan

Dollar (2000), efektivitas bantuan sangat tergantung pada kebijakan ekonomi yang ada di negara penerima. Mereka menemukan bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan dampak yang signifikan jika diberikan dalam konteks kebijakan makroekonomi yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan yang mendukung, seperti disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi, mampu memanfaatkan bantuan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara bantuan luar negeri dan kebijakan domestik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Namun, pendekatan ini tidak tanpa kritik. Penelitian yang dilakukan oleh Dambisa Moyo (2009) memberikan pandangan yang berbeda mengenai efek jangka panjang dari bantuan luar negeri. Moyo menjelaskan bahwa ketergantungan pada bantuan dapat menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, di mana negara-negara penerima tidak termotivasi untuk mengembangkan kapasitas internal dan inovasi. Ia menyarankan bahwa fokus seharusnya dialihkan ke pengembangan sektor swasta dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, daripada bergantung pada aliran bantuan yang bersifat sementara. Moyo mengklaim bahwa strategi jangka panjang harus mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan peningkatan akses ke pasar global.

Pendekatan lain yang muncul dalam kajian bantuan luar negeri yang menyoroti aspek-aspek struktural dan kekuasaan dalam hubungan antara donor

dan penerima. Peneliti seperti Easterly (2006) berargumen bahwa banyak proyek bantuan tidak memenuhi tujuan yang diharapkan karena kurangnya pemahaman terhadap keterlibatan masyarakat. Dalam pandangannya, banyak proyek bantuan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan dinamika sosial di negara penerima, yang mengakibatkan kegagalan dalam implementasi dan dampak yang terbatas. Easterly menyarankan bahwa pendekatan yang lebih berbasis masyarakat, di mana penerima bantuan terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, dapat meningkatkan efektivitas bantuan.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan luar negeri menjadi salah satu topik yang sangat penting, karena keduanya memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi negara penerima. Riddell (2007) menekankan bahwa transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana bantuan dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan kepercayaan antara negara donor dan penerima, serta menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan saling mendukung. Ketika alokasi dana dan pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan, maka pihak penerima akan lebih mudah mengakses informasi mengenai bagaimana dana tersebut digunakan dan untuk tujuan apa, yang pada gilirannya dapat mendorong pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, di mana setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, diharapkan penerima bantuan dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini

tentunya akan meningkatkan dampak positif dari bantuan yang diberikan, sehingga tujuan awal kerjasama, seperti peningkatan kualitas pendidikan atau pembangunan infrastruktur, dapat tercapai dengan lebih baik dan lebih cepat.

Lebih lanjut, Riddell juga mencatat bahwa pendekatan yang lebih transparan dalam pengelolaan dana bantuan dapat secara signifikan mengurangi risiko korupsi, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam keberhasilan program bantuan luar negeri. Tanpa adanya transparansi, dana bantuan sering kali tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan, atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan. Dengan mengadopsi mekanisme yang lebih terbuka dan dapat diawasi, negara donor dapat memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tertentu benar-benar digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, penguatan sistem akuntabilitas tidak hanya bermanfaat bagi negara penerima bantuan, tetapi juga bagi negara donor, karena memastikan bahwa kontribusi mereka digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan yang sah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar prinsip yang diharapkan dalam pengelolaan bantuan luar negeri, tetapi juga merupakan faktor penentu keberhasilan yang sangat penting dalam mewujudkan kerjasama internasional yang efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konteks politik dan stabilitas pemerintahan juga berperan penting dalam efektivitas bantuan. Menurut penelitian oleh Knack dan Rahman (2007), negara-negara dengan pemerintahan yang kuat dan stabil cenderung lebih berhasil dalam

memanfaatkan bantuan untuk pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengelola proyek bantuan dengan lebih baik. Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau ketidakstabilan politik sering kali mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bantuan secara lebih baik.

Perubahan dinamika geopolitik yang cepat dan seringkali tidak terduga turut memberikan dampak signifikan terhadap cara dan tujuan pemberian bantuan luar negeri, yang sering kali menciptakan ketegangan antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan politik negara donor. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan luar negeri sering dianggap sebagai alat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara penerima, kenyataannya bantuan tersebut sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan strategis yang lebih luas. Dalam banyak kasus, distribusi bantuan tidak selalu didasarkan pada kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh negara penerima, melainkan lebih pada pertimbangan politik yang dapat memperkuat posisi atau pengaruh negara donor di tingkat internasional, baik itu dalam hubungan bilateral, kesepakatan perdagangan, maupun dalam konteks geopolitik yang lebih besar.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai integritas dan keadilan dalam sistem bantuan internasional. Jika bantuan luar negeri lebih didorong oleh kepentingan politik daripada oleh kebutuhan nyata negara penerima, maka tujuan utama dari bantuan tersebut, yakni untuk

mengurangi kesulitan dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan, menjadi terabaikan. Hal ini membuka kemungkinan ketidaksetaraan dalam distribusi bantuan, di mana negara-negara yang kurang memiliki pengaruh politik atau yang tidak mendukung kepentingan negara donor sering kali terabaikan, meskipun mereka menghadapi tantangan yang lebih besar.

Ketergantungan pada bantuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan politis dapat mengarah pada pengabaian terhadap hak-hak rakyat di negara penerima, bahkan memperburuk ketegangan internal atau ketidakstabilan politik di negara tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan dinamika geopolitik yang terus berkembang, sangat penting bagi komunitas internasional untuk meninjau kembali dan mereformasi sistem bantuan luar negeri agar lebih adil, transparan, dan berfokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan, daripada semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan politik yang sering kali bersifat sesaat.

Program INOVASI akan penulis analisis melalui teori *foreign aid* dan motif yang mendasari kerja sama *government-to-government* (G2G) antara pemerintah Indonesia dan Australia. Dalam teori *foreign aid*, bantuan ini termasuk dalam kategori *development aid*, yang bertujuan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di negara penerima. Program INOVASI dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam literasi, numerasi, dan hasil belajar siswa di wilayah-wilayah terpencil. Pendekatan ini mencerminkan bantuan berbasis kebutuhan (*needs-based aid*), karena program ini menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan, serta

bantuan berbasis hasil (*results-based aid*), dengan fokus pada dampak nyata yang dapat diukur.

Motif utama dari program INOVASI dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari sisi kemanusiaan, program ini berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dengan harapan menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi muda. Secara ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, yang juga memberikan manfaat jangka panjang bagi Australia sebagai mitra dagang utama. Selain itu, dari perspektif politik dan diplomatik, program ini memperkuat hubungan bilateral kedua negara, sekaligus menunjukkan komitmen Australia terhadap kemitraan strategis dengan Indonesia. Motif keamanan juga terlihat dalam program ini, karena peningkatan pendidikan di Indonesia dapat membantu mengurangi risiko konflik sosial dan menciptakan stabilitas regional yang penting bagi Australia. Tidak kalah penting, program ini mencerminkan motif budaya dan ideologi, dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat yang juga sejalan dengan visi Australia.

Sebagai bentuk kerja sama *government-to-government*, INOVASI mencerminkan koordinasi langsung antara kedua pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi pelaksanaan dan penyesuaian program dengan kebutuhan lokal di Indonesia. Dengan demikian, program INOVASI tidak hanya menjadi bukti nyata penerapan teori *foreign aid*, tetapi juga menggambarkan perpaduan motif

kemanusiaan, ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi yang mendasari kerja sama bilateral strategis antara Indonesia dan Australia.

Kesimpulannya, teori foreign aid mencerminkan berbagai pandangan dan pendekatan yang beragam mengenai bagaimana bantuan luar negeri dapat memengaruhi pembangunan. Sementara beberapa peneliti menekankan pentingnya kebijakan yang baik dan kondisi politik yang stabil untuk meningkatkan efektivitas bantuan, yang lain menggarisbawahi risiko ketergantungan dan perlunya pendekatan yang lebih berbasis masyarakat. Dengan meningkatnya perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan dinamika geopolitik, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi bantuan luar negeri menjadi semakin penting. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dialog dan kolaborasi antara donor dan penerima, serta pemahaman lebih baik tentang wilayah yang akan menjadi kunci untuk menciptakan dampak positif dari bantuan luar negeri.

C. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia-Australia melalui program INOVASI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk memahami pelaksanaan dan dampak program INOVASI di Kota Batu, Jawa Timur, sebagai salah satu lokasi implementasi. Penelusuran penelitian terdahulu bertujuan memberikan kerangka dasar mengenai hubungan bilateral kedua negara dalam bidang pendidikan, serta hasil dan tantangan dari program tersebut secara umum. Informasi dari penelitian

sebelumnya akan digunakan sebagai pijakan untuk menganalisis dan mendalami temuan dalam studi ini.

Penelitian pertama merupakan karya Yeni Wijayanti yang berjudul “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995”. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Australia yang terus mengalami perubahan selama beberapa dekade. Hubungan kedua negara awalnya sangat baik, terutama ketika Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya. Australia memberikan dukungan besar, untuk membantu Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus dan sering diwarnai ketegangan, terutama akibat perbedaan sistem politik, kebijakan luar negeri, persepsi ancaman keamanan, serta kurangnya kolaborasi ekonomi yang kuat.

Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa meskipun hubungan kedua negara kerap menghadapi tantangan, berbagai langkah telah dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan bilateral. Kedua negara menyadari bahwa kepercayaan dan kerja sama adalah kunci penting untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Temuan dari penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Australia, khususnya dalam aspek politik, ekonomi, dan keamanan.

Penelitian kedua ditulis oleh Vinsensio M. A. Dugis (2015) membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Australia yang mengalami pasang surut akibat berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial. Dugis menyoroti pentingnya

pendekatan Diplomasi Pertemanan (*Mateship Diplomacy*), yang bertujuan membangun kembali hubungan melalui komunikasi langsung antar pemerintah serta penguatan hubungan antarmasyarakat (*people-to-people relations*).

Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa kendati hubungan Indonesia-Australia sering kali terganggu oleh perbedaan pandangan politik dan budaya, upaya diplomasi yang berbasis pada kesamaan kepentingan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki hubungan bilateral dan menciptakan kerja sama yang lebih stabil di masa depan.

Penelitian ketiga merupakan karya dari Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, dan Muhammad Fahmi dalam artikel berjudul "Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program AusAID di Sektor Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014–2019" menyoroti kerja sama bilateral yang berlangsung pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2013). Penelitian ini berfokus pada kontribusi program bantuan Australia, yang tidak hanya mencakup sektor pendidikan tetapi juga berbagai bidang lainnya untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang kompeten. Beberapa capaian penting yang dihasilkan dari program-program AusAID meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, serta penyediaan sumber daya dan fasilitas belajar yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggambarkan dampak positif dari kerja sama bilateral tersebut terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,

meskipun fokusnya lebih pada analisis capaian program di masa pemerintahan sebelumnya.

Kemudian penelitian ini mengalihkan perhatian pada periode pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) dengan pendekatan analisis berbasis teori liberalisme untuk mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan yang didukung AusAID. Dalam penelitian ini, program seperti *Education Partnership*, *Technical Assistance for Education System Strengthening* (TASS), dan *Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI) diidentifikasi memberikan dampak signifikan, seperti peningkatan aksesibilitas pendidikan yang inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan infrastruktur pendidikan yang berstandar tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerja sama bilateral di sektor pendidikan selama era Jokowi menjadi manifestasi dari nilai-nilai liberalisme, di mana kolaborasi antarnegara bertujuan menciptakan kemajuan bersama yang tidak hanya memperkuat sistem pendidikan di Indonesia tetapi juga mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara.

Penelitian keempat yang berjudul “Level Kemampuan Membaca Siswa Sekolah Dasar di Kelas Tinggi” oleh Zuyyina Khaerawati, Nurhasanah, dan Itsna Oktaviyanti mengungkap pentingnya kemampuan membaca sebagai dasar keberhasilan belajar siswa. Namun, kemampuan membaca siswa sekolah dasar di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), masih tergolong rendah. Data dari PISA (2015, 2018) dan PIRLS (2011) menunjukkan Indonesia menempati peringkat bawah dalam kemampuan membaca. Kondisi ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya motivasi, kurangnya dukungan keluarga, lingkungan sekolah yang kurang kondusif, dan keterbatasan fasilitas belajar. Pendekatan berbasis level seperti *Teaching at the Right Level* (TaRL), yang diadaptasi dalam program Semua Anak CERDAS (SAC), terbukti efektif meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan mereka.

Beberapa penelitian terkait juga menyoroti keberhasilan pendekatan berbasis level. Penelitian oleh Akbar dan Pancor (2022) menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan membaca siswa Madrasah Ibtidaiyah setelah diterapkan pembelajaran berbasis level. Sarika (2021) menemukan bahwa siswa kelas V memiliki kemampuan membaca pemahaman yang masih berada pada kategori cukup, dengan hambatan utama berupa motivasi dan minat yang rendah, serta keterbatasan bahan bacaan. Ambarita et al. (2021) mengungkapkan bahwa siswa kelas III memiliki kemampuan yang baik dalam pemahaman literal tetapi lemah dalam pemahaman interpretatif dan kritis. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi yang terfokus pada pendekatan level kemampuan, disertai dengan dukungan lingkungan keluarga dan fasilitas pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan membaca secara berkelanjutan.

Penelitian kelima berjudul “Bantuan Luar Negeri Australia Melalui Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia Fase I Periode 2016–2020” yang ditulis oleh Ardiansyah, membahas keterlibatan Australia dalam mendukung

sektor pendidikan Indonesia melalui program kerja sama yang difokuskan pada pendidikan dasar. Program INOVASI, yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, bertujuan meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa, melatih kompetensi guru, serta memperbaiki pengelolaan kelas. Penelitian ini juga menyoroti berbagai permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia, seperti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, ketidakefisienan sistem pendidikan dalam hal pengelolaan sumber daya, serta kurang relevannya kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Penelitian ini menggunakan konsep Kepentingan Nasional dan Bantuan Luar Negeri untuk menganalisis motivasi Australia dalam memberikan bantuan. Melalui perspektif ini, bantuan luar negeri dipandang sebagai instrumen diplomasi yang bertujuan melayani kepentingan strategis Australia, seperti menjaga stabilitas kawasan, mencegah radikalisme, serta memperkuat hubungan bilateral yang mendukung kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif berbasis studi kasus, dengan sumber data utama dari wawancara, dokumen resmi, serta studi literatur dari jurnal dan buku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan strategis di balik program INOVASI, mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pendidikan Indonesia, serta menelaah respons kebijakan pemerintah Indonesia terhadap bantuan luar negeri tersebut. Program ini mencerminkan pentingnya sinergi antarnegara dalam mengatasi tantangan

pendidikan, sekaligus menunjukkan peran strategis pendidikan dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas Program INOVASI. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi program secara nasional atau di wilayah yang luas, seperti yang dilakukan oleh Ardiansyah, yang mengevaluasi fase pertama INOVASI di berbagai provinsi di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada Kota Batu, Jawa Timur, sebagai studi kasus untuk menganalisis dampak program di Kota Batu. Selain itu, penelitian sebelumnya sering kali menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada pencapaian program, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen untuk menggali implementasi dan dampak program terhadap literasi, numerasi, dan pendidikan inklusif.

Dari segi kerangka teoritis, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada konsep bantuan luar negeri untuk menjelaskan peran Australia dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan teori foreign aid dengan teori kerjasama bilateral, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara strategi bantuan internasional dan diplomasi bilateral Indonesia-Australia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan program INOVASI dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menyoroti bagaimana program ini memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara. Dengan demikian,

penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih terfokus dan mendalam, baik dari segi konteks lokal maupun kontribusinya terhadap hubungan bilateral.